

LAPORAN RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI

Unit Kerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 895 6631 0423)

Pembukaan

- UU KIP pada prinsipnya semua informasi sifatnya terbuka dan bisa diakses oleh publik secara luas namun ada beberapa data yang dikecualikan
- Dengan adanya uji konsekuensi dapat menjadi pedoman untuk bisa dimasukkan ke dalam program satu data secara nasional dapat diakses oleh publik secara luas
- Pangujian konsekuensi terhadap informasi menggunakan matriks khusus penjabaran atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 17 tentang Uji Konsekuensi
- Pengujian konsekuensi dilakukan PPID dengan pendampingan Tim Hukum dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Dalam hal pembahasan bersama unit kerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum terdapat 6 data yang disampaikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi

Pembahasan

- Matriks ini sebelumnya sudah diisi oleh unit kerja, terbagi menjadi 3 indikator
- Indikator A
Dalam matriks terdapat 35 poin , apabila ada jawaban “ya” maka termasuk kedalam informasi yang dikecualikan dan apabila semua matriks jawabannya “tidak” maka termasuk ke dalam informasi yang tidak dikecualikan, kemudian akan dibuatkan Berita Acara yang di TTD kedua belah pihak
Apabila dari nomor 1 sampai dengan 35 semua jawabannya “tidak” sehingga atas pengisian matriks ini menyatakan bahwa bisa dilanjutkan untuk mengisi bagian B dalam uji konsekuensi

- Indikator B

Dalam matriks B dari nomor 1 sampai dengan 10 semua jawaban “tidak” sehingga bisa dilanjutkan ke dalam indicator C

- Indikator C

Dalam indicator C akan diisi oleh pihak PPID dan apabila ada jawaban “ya”

- Secara substansi yang kita termasuk kedalam informasi yang dikecualikan

Secara umum di dalam uji konsekuensi dari pelaksanaan uji konsekuensi ini dalam UU KIP, kita coba memilih atau memprioritaskan mana saja informasi yang dikecualikan namun apabila semuanya diuji akan memakan waktu yang lama

- Sebenarnya informasi yang kita uji ke dalam uji konsekuensi adalah informasi yang diusulkan oleh setiap unit kerja untuk diuji oleh PPID dan dibuatkan dasar hukumnya

Kesimpulan

No	Nama	Hasil Pengujian	Aturan
1	Arsip Digital Individu Pegawai	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5
2	Arsip Fisik Individu Pegawai	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5
3	Surat Pemanggilan Disiplin Pegawai	Informasi dikecualikan	• UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 2 • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1)
4	Laporan Konseling	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4
5	Laporan Hasil Pemeriksaan	Informasi dikecualikan	• UU KIP pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, • UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d • Peraturan Badan Kepegawaian

			Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1)
6	Surat Keputusan Hukuman Disiplin	Informasi dikecualikan	• UU KIP pasal 17 huruf 9, pasal 6 ayat (3) huruf d • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1)

The screenshot shows a Microsoft Word document with the following table content:

No	A. SURVEI DAN PENGUMPULAN INFORMASI	Berkas (simulasi dan hasil)	Keterangan
1	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP?		
2	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
3	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
4	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
5	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
6	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
7	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
8	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
9	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	
10	Apakah informasi yang dibutuhkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UJI KP pada 17 tahun angka 2 (menggunakan simulasi dan hasil dari simulasi hasil dari simulasi)	100%	

REFORMASI BIROKRASI
BERDAMPAK **UNTUK**
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Logo of PANRB (Pusat Analisis dan Pengembangan Kebijakan) and BPPM (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan) are visible in the top left corner. The background also features a silhouette of the Tugu Pahlawan and a hashtag #bangga.melakukan.berbagai.